



KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 04 TAHUN 2011

TENTANG

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ)
KEPALA DAERAH AKHIR TAHUN ANGGARAN 2010
KABUPATEN LAMONGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN

- Menimbang** :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 23 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;
 - b. Bahwa sehubungan dengan konsideran menimbang huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 Tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Lamongan dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 41);
 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, tambahan lembaran Negara Nomor 4389);
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang No. 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No. 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4844);
 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah Kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 31 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 2 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2006-2010;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 28 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2011;

Memperhatikan : Hasil Rapat Paripurna Istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 hari Senin, tanggal 11 April 2011.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah akhir tahun anggaran 2010.
- KEDUA : Dengan keputusan ini, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan telah menyampaikan rekomendasi hasil pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2010 Kabupaten Lamongan berupa catatan-catatan strategis yang berisikan saran, masukan dan/atau koreksi terhadap penyelenggaraan urusan desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas umum pemerintah sebagaimana terlampir.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan..

Ditetapkan di : Lamongan
Pada tanggal : 11 April 2011

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN
KETUA


H. MAKIN ABBAS, Lc, MA

Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1 Sdr. Bupati Lamongan ;
2 Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan ;
3 Sdr. Kepala Bappeda Kabupaten Lamongan ;
4 Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Kabupaten Lamongan ;
5 Sdr. Kepala Bagian Hukum Setda
Kabupaten Lamongan.
-

**LAPORAN PANITIA KHUSUS DPRD
HASIL PEMBAHASAN
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2010
PADA RAPAT PARIPURNA ISTIMEWA DPRD
TANGGAL 11 APRIL 2011**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yth. Sdr. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Lamongan;

Yth. Sdr. Bupati dan Wakil Bupati Lamongan;

Yth. Sdr. Anggota Muspida Kabupaten Lamongan;

Yth. Sdr. Sekretaris Daerah, Para Asisten dan Sekretaris Dewan;

Yth. Sdr. Kepala Badan, Dinas, Kantor dan Bagian dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan;

Yth. Sdr. Para Camat, Rekan-rekan wartawan dan hadirin yang berbahagia.

Mengawali penyampaian laporan ini, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat yang diberikan kepada kita, sehingga pada hari ini kita masih dapat menghadiri Rapat Paripurna Istimewa DPRD dalam rangka penyampaian hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2010 dalam suasana penuh keakraban dan kekeluargaan.

Sholawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW.

Hadirin Rapat Dewan yang terhormat,

Pada kesempatan ini, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada pimpinan rapat atas waktu yang diberikan untuk menyampaikan Laporan Hasil Pembahasan LKPJ Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2010 pada Rapat Paripurna Istimewa DPRD hari ini.

Selain itu, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Saudara Bupati yang telah menyampaikan Pengantar Penjelasan LKPJ Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2010 pada rapat paripurna tanggal 31 Maret 2011, sehingga dapat memperjelas Panitia Khusus dalam menanggapi dan mencermati LKPJ Kepala Daerah.

Disamping itu, ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Fraksi dan Komisi yang turut serta memberikan masukan dan saran dalam pembahasan LKPJ sehingga dapat menghasilkan rekomendasi untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah kedepan.

Hadirin Rapat Dewan yang terhormat,

Selanjutnya, perkenankanlah kami menyampaikan Laporan Panitia Khusus dengan sistematika sebagai berikut :

- I. PENDAHULUAN
- II DASAR DAN PROSES PEMBAHASAN
- III HASIL PEMBAHASAN
- IV. PENUTUP

I. PENDAHULUAN

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah sejalan dengan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab serta mampu menjawab tuntutan reformasi sebagaimana prinsip tata pemerintahan yang baik, maka Kepala daerah wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah salah satunya dalam bentuk Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran kepada DPRD. Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk hubungan *checks and balances* yang lebih seimbang antara Kepala Daerah dengan DPRD.

Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat, menyebutkan bahwa LKPJ Akhir Tahun Anggaran dibahas oleh DPRD secara internal sesuai dengan Tata Tertib DPRD dan hasil pembahasannya dituangkan dalam Keputusan DPRD sebagai rekomendasi kepada Kepala Daerah untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan.

Berdasarkan gambaran data yang disampaikan dalam LKPJ Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2010, secara umum telah memenuhi target kinerja RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2006-2010, namun sebagian masih ada beberapa

indikator program yang belum sesuai target kinerja yang menjadi catatan DPRD untuk memperoleh tindak lanjut dari pemerintah daerah.

II. DASAR DAN PROSES PEMBAHASAN

A. Dasar Pembahasan :

1. Surat Bupati Lamongan tanggal 18 Maret 2011 Nomor 045.2/226.1/413.201/2011 perihal Penyampaian Bahan LKPJ Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2010;
2. Hasil Rapat Badan Musyawarah pada tanggal 22 Maret 2011;
3. Keputusan DPRD Nomor 3 Tahun 2011, Tanggal 30 Maret 2011 tentang Pembentukan Panitia Khusus LKPJ Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2010;

B. Proses Pembahasan

Adapun tahapan pembahasan ditingkat Panitia Khusus, dapat kami sampaikan sebagai berikut :

1. Hari Rabu, Kamis tanggal 6 dan 7 April 2011 membahas LKPJ Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2010;
2. Hari Jumat tanggal 8 April 2011
Validasi terhadap hasil pembahasan, sebagaimana hasilnya kami sampaikan dalam forum Sidang Yang Terhormat ini.

III. HASIL PEMBAHASAN

Hadirin Rapat Dewan yang terhormat,

Berdasarkan hasil pembahasan LKPJ Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2010, yang dilakukan Panitia Khusus, maka dapat kami sampaikan rekomendasi yang berupa catatan strategis yang berisikan saran, masukan dan/atau koreksi terhadap penyelenggaraan urusan desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan sebagai berikut :

1. Dalam bidang pelayanan kesehatan masyarakat, ada hal penting yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah diantaranya :
 - a. Perlunya penguatan keberadaan Bidan Desa dalam memberikan pelayanan kesehatan masyarakat mengingat kondisi topografi dan wilayah Lamongan yang cukup luas dengan cara memaksimalkan pembinaan

posyandu di dusun-dusun, dan memberikan motivasi kepada pasangan usia subur untuk menggunakan alat kontrasepsi KB yang telah diprogramkan oleh pemerintah daerah sehingga terwujud Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera (KKBS).

- b. Dalam hal pelayanan kesehatan masyarakat terutama pemegang kartu JAMKESDA dan JAMKESMAS jangan lagi terjadi diskriminasi dan perlakuan yang kurang ramah. Untuk itu, sebagai Badan Layanan Umum Daerah, RSUD Dr. Soegiri Lamongan diminta meningkatkan kualitas pelayanan secara signifikan, disiplin kerja para dokter dan karyawan, kelengkapan peralatan kedokteran yang modern sehingga mampu bersaing dengan Rumah Sakit Swasta.
2. Upaya penegakan peraturan daerah yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja masih perlu peningkatan. Modernisasi dan perkembangan yang terjadi di masyarakat harus disertai dengan peningkatan kualitas dan profesionalitas personil. Berdasarkan hasil evaluasi, Pansus menilai upaya penertiban tempat usaha yang melanggar ijin sebagaimana mestinya, belum dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan daerah dan terkesan belum ada koordinasi yang baik dengan beberapa SKPD terkait, sehingga masih dijumpai adanya permasalahan perijinan. Maka kedepan, perlu ada peningkatan koordinasi dan kerjasama yang lebih baik dan terintegrasi sehingga permasalahan perijinan tidak terjadi lagi.
 3. Kondisi infrastruktur jalan kabupaten dan poros desa di Lamongan saat ini cukup memprihatinkan sehingga mengganggu aktifitas masyarakat dan arus transportasi. Untuk itu, pemerintah daerah diminta segera melakukan langkah-langkah percepatan pembangunan dan pemeliharaan jalan yang mengalami kerusakan melalui perencanaan yang baik dan kajian teknis jalan terlebih dahulu sehingga tidak mudah rusak.
Seiring itu, dalam rangka mencegah terjadinya banjir, maka perlu adanya perbaikan dan pembenahan sarana irigasi yang memadai melalui pengerukan waduk, normalisasi kali pematas dan perbaikan saluran primer maupun sekunder. Agar pembangunan infrastruktur memiliki kualitas yang baik, sebagaimana harapan kita bersama, maka harus dilakukan pengawasan melekat dengan didukung komitmen semua pihak untuk mengedepankan kepentingan masyarakat.

4. Perubahan iklim dan cuaca yang sulit diprediksi seringkali menyebabkan terjadinya serangan hama pada tanaman misalnya hama wereng coklat. Untuk itu, Pemerintah Daerah diminta mengambil langkah-langkah strategis diantaranya :
- a. Mengoptimalkan peran dan fungsi Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) untuk membantu dan memfasilitasi petani dalam menyelesaikan permasalahan pertanian;
 - b. Pengadaan Varietas Benih Unggul Tahan Wereng (VUTW) ;
 - c. Menyiapkan program kebun benih dengan melibatkan para petani;
 - d. Menyediakan pupuk dan obat – obatan yang memadai;
 - e. Mengoptimalkan peran Lumbung Pangan Desa untuk membeli hasil gabah pada waktu panen raya dengan mengalokasikan anggaran yang lebih memadai.

Selanjutnya, hasil pembahasan secara lengkap sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan ini.

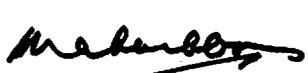
IV. PENUTUP

Demikian Laporan Panitia Khusus Hasil Pembahasan LKPJ Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2010 yang dapat kami sampaikan, untuk memperoleh perhatian Kepala Daerah dalam rangka perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sekian terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq walhidayah Ws. Wb.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN
PANITIA KHUSUS**

Ketua


H. MAKIN ABBAS, Lc, MA

Sekretaris


Ir. H. Ali Prasetyo

**LAMPIRAN : HASIL PEMBAHASAN LAPORAN
KETERANGAN PERTANGGUNG-
JAWABAN KEPALA DAERAH
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2010**

Dari hasil pembahasan LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2010 secara lengkap dapat kami sampaikan sebagai berikut :

1. Dinas Pendidikan

Pelaksanaan pembangunan dibidang pendidikan secara umum sudah mengalami peningkatan dan kemajuan, dibuktikan dengan diterimanya predikat kejuaraan tingkat Propinsi Jawa Timur maupun tingkat nasional. Namun apabila kita cermati pada visi misi serta skala prioritas pembangunan yang disampaikan Saudara Bupati dalam penyampaian Pengantar dan Excecutive Summary LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2010 belum sepenuhnya berjalan.

- a. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2006 pasal 94 ayat (1) menyebutkan bahwa pendanaan dalam rangka tugas pembantuan dilaksanakan setelah adanya penugasan pemerintah melalui Kementerian Negara atau Lembaga Negara kepada Kepala Daerah. Tugas pembantuan yang diterima khususnya dibidang pendidikan baik yang berasal dari sharing dana APBD Propinsi maupun APBN dalam perencanaan maupun pelaksanaannya nampak belum transparan.
- b. Adapun yang menjadi kendala atau hambatan pencapaian kualitas pendidikan selama ini disebabkan antara lain :
 - 1). belum meratanya bantuan pembangunan sekolah disemua tingkatan ditandai dengan kurangnya sarana dan prasarana sekolah;
 - 2). adanya penempatan guru yang belum sesuai kompetensi akademik;
 - 3). Rasio perbandingan guru dengan rombongan belajar tidak seimbang antara perkotaan dan pedesaan;
- c. Program *merger* khususnya pendidikan dasar agar mempertimbangkan kedekatan kelembagaan maupun jarak tempuh peserta didik dengan sekolah.

2. Dinas Kesehatan

1. Program Obat dan Pembekalan Kesehatan.

Pengadaan obat belum maksimal karena obat yang dibutuhkan tidak tersedia stok tetapi justru obat yang tidak dibutuhkan stoknya terlalu banyak. Untuk itu dalam pengadaan obat-obatan seharusnya disesuaikan dengan kebutuhan.

2. Program Upaya Kesehatan Masyarakat.

- a. Program penanggulangan bencana yang hanya dianggarkan Rp. 7.500.000 merupakan program yang tidak realistis mengingat wilayah Lamongan yang luas dan jumlah penduduk yang cukup banyak sehingga program ini terkesan formalitas saja.
- b. Penggunaan Dana Cukai kurang bermanfaat, karena dana Milyaran Rupiah habis dipergunakan untuk kegiatan sosialisasi, Workshop promosi yang outputnya tidak maksimal bahkan terkesan untuk menghabiskan uang saja.
- c. Pelayanan Rawat Jalan gratis masih dijumpai dipungut biaya oleh oknum petugas Puskesmas.
- d. Dalam melaksanakan program pembangunan dan pengadaan barang/jasa hendaknya dilakukan sesuai mekanisme dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku misalnya Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang /Jasa.
- e. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dalam bentuk kegiatan penyemprotan / Fogging Nyamuk Demam Berdarah (DBD) dengan anggaran Rp. 30.000.000, - tidak realistis mengingat wilayah Kabupaten Lamongan yang luas dengan jumlah penduduk yang cukup besar.

Mencegah Penyakit Demam Berdarah (DBD) merupakan wabah yang terjadi setiap tahun, maka kedepan pemerintah daerah diharapkan meningkatkan anggaran pada program tersebut sehingga masyarakat tidak terbebani biaya.

3. RSUD Dr. Soegiri Lamongan

- a. Realisasi penggunaan anggaran pada program penyelenggaraan pelayanan di Instalasi Farmasi sebesar Rp. 12.544.820.799,- dari total anggaran sebesar Rp. 13.731.507.470, hendaknya dikoreksi dan dievaluasi

kembali, mengingat pasien yang berobat ke Rumah Sakit Dr. Soegiri Lamongan adalah pasien umum dimana dalam pembelian obat-obatan ditanggung sendiri oleh pihak pasien. Sedangkan bagi pasien Jamkesmas dan Jamkesda, anggaran peralatan Kesehatan dan obat-obatannya diklaim ke pihak Askes.

- b. Perubahan status RSUD Dr. Soegiri menjadi BLUD (Badan Layanan Umum Daerah), perlu diimbangi peningkatan pelayanan secara signifikan, sehingga mampu bersaing dengan Rumah Sakit swasta, baik dalam pelayanan pasien, kelengkapan peralatan, sumberdaya manusia maupun kebersihannya.
- c. Dalam hal pelayanan, pegawai RSUD Dr. Soegiri Lamongan belum menunjukkan sikap yang baik dan ramah pada pasien terutama pengguna Kartu Jamkesmas dan Jamkesda.
- d. Kondisi Rumah Sakit Dr. Soegiri Lamongan yang masuk kategori Rumah Sakit tipe B masih perlu pembenahan diantaranya pengadaan peralatan CTYSCAN, maupun peralatan kedokteran yang lebih modern sehingga bisa memenuhi kebutuhan pasien.
- e. Dalam hal penggunaan anggaran yang cukup besar untuk peningkatan Sumber Daya Manusia agar diikuti dengan peningkatan pelayanan kepada pasien.

4. Badan Lingkungan Hidup

Piala Adipura yang diperoleh setiap tahun merupakan prestasi yang cukup menjadi indikator keberhasilan pelaksanaan Badan Lingkungan Hidup tahun 2010. Meskipun hendaknya dipahami bahwa aspek penilaian penghargaan dari Presiden RI ini hanya sebatas area perkotaan. Oleh karena itu, evaluasi kinerja Badan Lingkungan Hidup hendaknya mempertimbangkan beberapa aspek sebagai berikut :

- a. Kebersihan lingkungan ditingkat kecamatan, terutama kebersihan sungai yang ada dibantaran bengawan jero yang ditumbuhi tanaman enceng gondok hingga saat ini. Oleh karena itu, maka pemerintah daerah

memperhatikan capaian mutu kerja dari tahap perencanaan sampai dengan tahap pemeliharaan. Selain itu, Dinas terkait dalam hal pekerjaan kontruksi hendaknya semakin meningkatkan ketegasan dalam menegakkan peraturan dan perundangan yang berlaku.

- b. Pencanaan prosedur pelaporan yang telah secara detail yang disampaikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen jangan hanya sebatas prosedural belaka. Evaluasi dan penilaian terhadap laporan proyek hendaknya benar-benar memperhatikan dan menegakkan peraturan yang berlaku. Pejabat Pembuat Komitmen juga harus melakukan verifikasi hasil proyek sekaligus melibatkan masyarakat sekitar dalam penilaian *progress* pelaksanaan proyek.
- c. Diperlukan perhitungan yang memadai terhadap kualitas pembangunan jalan agar belanja pemeliharaan jalan tidak semakin membebani belanja infrastruktur. Seringkali ditemukan di beberapa ruas jalan poros kecamatan, jalan-jalan yang dibangun tidak berumur lebih dari satu tahun telah memerlukan pemeliharaan maupun rehabilitasi.
- d. Penting pula dilakukan analisis peningkatan kapasitas jalan dikaitkan dengan :
 - 1) Meningkatnya volume kendaraan akibat perkembangan ekonomi dan jumlah penduduk.
 - 2) Kebutuhan transportasi baik dari sisi ekonomi, warga maupun pendidikan.
 - 3) Dampak luapan air akibat banjir pada tahun 2010 maupun tahun 2011.
- e. Urusan pengairan yang dilaksanakan oleh Dinas PU. Pengairan, kiranya beberapa hal terkait kinerja pelaksanaan urusan ini adalah :
 - 1) Masih banyak keluhan masyarakat seputar kurangnya koordinasi pelaksanaan proyek irigasi dengan pihak masyarakat pemanfaat proyek, akibatnya mutu sarana dipandang tidak optimal, dimana semakin meningkatkan persepsi masyarakat terhadap rendahnya kredibilitas Dinas Pengairan dan Kontraktor.
 - 2) Pembangunan pintu air dan jaringan irigasi belum menampakkan hasil nyata terutama dikaitkan dengan upaya antisipasi bencana banjir.

Meski di klaim terjadi penurunan luas area genangan sebesar 1,19 %, namun dilapangan area langganan banjir tetap saja terjadi.

- 3) Dalam pelaksanaan peninggian tanggul, pengurukan waduk, perbaikan daerah irigasi waduk, adalah tentang pemadatan tanah perlu ditingkatkan, kualitas pemadatannya dan agar tidak mudah longsor supaya ditanami rumput setelah selesai pekerjaan pemadatan tanah.
- 4) Untuk normalisasi saluran irigasi yang menjadi perhatian adalah tentang kedalaman saluran serta plengsengan utamanya yang bukan tembok sebagai penahan tanah, supaya ditanami rumput agar tidak mudah longsor.
- 5) Di Kabupaten Lamongan keberadaan waduk-waduk desa yang baku pengairannya cukup luas juga merupakan potensi untuk meningkatkan produksi pertanian dalam rangka mempertahankan Kabupaten Lamongan sebagai lumbung pangan Jawa Timur. Untuk itu normalisasi waduk-waduk desa harus mendapatkan perhatian yang serius oleh Pemerintah daerah.

6. Tata Ruang

Dibanding sebelumnya, pelaksanaan urusan tata ruang tahun 2010 pada satu sisi telah melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan rencana tata ruang. Meskipun pelibatan itu, masih terkesan pada batas-batas prosedur sosialisasi saja. Karena itu, kedepan keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan penyusunan penataan ruang semestinya tidak hanya pada tahap sosialisasi, tetapi harus sudah dimulai pada saat penyusunan draft rencana tata ruang.

Implikasi dari lemahnya kualitas perencanaan tata ruang di Kabupaten Lamongan antara lain :

- a. Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap hal-hal yang berpotensi melanggar Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Padahal berdasarkan undang undang Nomor 26 Tahun 2007, pelanggar RTRW bisa dikenai hukuman penjara;

- b. Aspek yang juga patut diperhatikan oleh SKPD terkait adalah semakin pentingnya upaya dan tindakan nyata dalam rangka penertiban, pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana tata ruang wilayah.
- c. besarnya area pertanian yang strategis dan produktif terkonversi menjadi area perumahan dan industri tanpa ada analisis dampak lingkungan maupun kesesuaian dengan RTRW Kabupaten Lamongan.
- d. masyarakat yang selama ini sering diabaikan dalam penyusunan RTRW harus semakin dilibatkan karena 80% pemanfaatan lahan dalam RTRW adalah pihak swasta. Keterlibatan masyarakat penting agar RTRW tidak kontra dengan kecenderungan sosiodemografis dan perkembangan ekonomi daerah.
- e. Karena luasnya cakupan wilayah RTRW, maka camat selaku wakil pemerintah kabupaten di setiap kecamatan harus tanggap, jeli, tegas dan teliti terhadap berbagai potensi pelanggaran RTRW diwilayahnya masing-masing.

7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pelaksanaan urusan perencanaan pembangunan semestinya terus memeperhatikan upaya peningkatan pemerataan pembangunan dan hasil hasilnya terus ditingkatkan untuk mengembangkan keserasian pertumbuhan antar daerah serta lebih mendayagunakan secara optimal potensi yang ada. Dalam hal itu SKPD terkait pelaksanaan urusan perencanaan pembangunan hendaknya memeperhatikan aspek-aspek permasalahan yang saat ini terjadi antara lain :

- a. Pada proses perencanaan anggaran pembangunan (APBD), partisipasi masyarakat belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Hal ini karena masih banyak hambatan-hambatan, salah satunya yang paling krusial adalah tertutupnya akses masyarakat daerah terhadap data anggaran seperti dokumen KUA, PPAS, RKA-SKPD, APBD, APBD Perubahan dan DPA. Forum-forum perencanaan pembangunan ditingkat SKPD belum berjalan baik untuk mengakomodasi partisipasi masyarakat dalam forum perencanaan anggaran.

Pemerintahan Daerah) maka kami minta hasil penelitian tersebut benar-benar merupakan rekomendasi kepada Dinas terkait utamanya pelayanan publik ada pergeseran tingkat pelayanan kurang puas menjadi puas.

9. Perumahan Rakyat

Pemerintah Kabupaten Lamongan telah memfasilitasi penyediaan sarana perumahan dan perbaikan terhadap infrastruktur di lingkungan perumahan. Namun perlu dicermati pula kredibilitas dan tanggung jawab pengembang perumahan terhadap pembeli (*user*) perumahan. Jangan sampai penyediaan dukungan fasilitas bagi perumahan malah mendorong pengembang mengabaikan tanggung jawab penyediaan infrastruktur yang telah dijanjikan kepada pembeli. Karena itu, kami merekomendasikan ;

- a. Pada kasus pengadaan sarana air bersih di Perumahan Graha Indah, sangat terkesan bahwa Pemkab. Lamongan didalam memberikan ijinnya kurang memperhatikan faktor penyediaan air terhadap pihak pengembang perumahan tersebut. Kalau memang pengembang telah nyata melanggar komitmen pengadaan fasilitas umum, air bersih, listrik dan sebagainya, maka sudah sepantasnya pihak pengembang mendapatkan sanksi tegas, seperti pencabutan ijin pengembangan kawasan perumahan.
- b. Terhadap kasus-kasus seperti ketidakmampuan pengembang menyediakan fasilitas umum. Pemerintah Kabupaten Lamongan terkesan kurang tegas mengambil tindakan. Jangan sampai kita mengorbankan masyarakat hanya untuk kepentingan pemupukan keuntungan investor daerah.
- c. Sarana air bersih dan sanitasi rumah sehat hendaknya terus ditingkatkan keterjangkauan bagi masyarakat. Selain untuk keluarga miskin juga untuk wilayah-wilayah yang sering dilanda banjir.

10. Dinas Pemuda dan Olah Raga.

Urusan kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Lamongan dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olah Raga, Dinas Pendidikan serta Dinas PU Cipta Karya secara terpadu. Adapun pelaksanaan secara umum sudah sesuai dengan RPJMD, kami berharap untuk meningkatkan prestasi kepemudaan dan Olah Raga di Kabupaten Lamongan agar pemerintah Daerah tidak henti-hentinya koordinasi dengan Pemerintah Propinsi maupun Pusat untuk

mendapatkan fasilitas pendanaan guna menunjang prasarana dan sarana olah raga yang dirasa kurang.

11. Kantor Penanaman Modal

Diantara pelaksanaan program 8 (delapan) Kegiatan Urusan Penanaman Modal Tahun 2010 yang paling menonjol adalah pendampingan penyusunan FS untuk pengembangan Perusahaan Daerah dengan alokasi anggaran Rp.75.000.000,- yang mana dalam program dan kegiatan ini di pergunakan untuk penyiapan penyusunan dokumen lelang/tender penyusunan FS pembangunan Air Bersih di Wilayah Pantura, kami memberikan catatan terhadap hal tersebut sebagai berikut :

- a. Setelah FS selesai dibuat agar dalam pelaksanaannya betul – betul direalisasikan, supaya pembuatan FS ada maknanya.
- b. Bahwa perkembangan wilayah Pantura sangat pesat mengingat wilayah Pantura di tetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Untuk itu agar rencana pengembangan harus sudah mengantisipasi adanya kemungkinan perkembangan industri, perdagangan, kawasan pelabuhan, jaringan jalan, kawasan pemukiman dll.

12. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

- a. Guna meningkatkan Pelayanan Publik khususnya dalam bidang pembuatan KTP, maka perlu peremajaan mesin-mesin pencetak KTP di Kecamatan-kecamatan yang sudah usang/tidak layak pakai.
- b. Blangko KTP di harapkan jangan sampai ada keterlambatan dalam pengirimannya.

13. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

- a. Masyarakat Lamongan adalah masyarakat perantau, hal ini terbukti disetiap Propinsi dan Kabupaten/ Kota diseluruh Indonesia terdapat masyarakat Lamongan bahkan diluar Negeri. Mengingat masyarakat Lamongan yang begitu giat dan gigih, maka agar pemerintah daerah segera mewujudkan Balai Latihan Kerja (BLK) yang representatif, sehingga masyarakat Lamongan mempunyai ketrampilan yang tidak kalah dari Tenaga Kerja Daerah lain.
- b. Program peningkatan pengawasan, perlindungan dan pencegahan Hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja agar dilakukan

secara serius dan didukung anggaran yang memadai mengingat masyarakat Lamongan adalah masyarakat perantau, baik didalam maupun diluar Negeri.

- c. Perlu ada pendataan Tenaga Kerja di Luar Negeri secara maksimal.

14. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

Dikabupaten Lamongan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, Bappeda serta Badan Pemberdayaan Masyarakat, meskipun ditangani secara terpadu serta berkelanjutan namun masih terjadi atau dijumpai kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga yang menyangkut wanita dan anak-anak, akibat keterbatasan pengetahuan masyarakat sebagai subyek kearah kemandirian. Untuk itu, harapan kami agar kasus-kasus serupa bisa ditekan seminimal mungkin dengan cara memperbanyak kegiatan sosialisasi dan pelatihan kepada kelompok perempuan serta melakukan kerjasama dengan perkumpulan perempuan dan lembaga-lembaga organisasi yang terkait untuk melakukan pendampingan mengenai KDRT.

15. Komunikasi dan Informatika

Pelaksanaan urusan komunikasi dan informatika secara umum sudah baik yang ditandai dengan diterimanya penghargaan sebagai Kabupaten terbaik Se Jawa Timur. Adapun asset pemerintah tentang RKPD harus di benahi secara optimal agar bisa di jangkau dari 27 Kecamatan.

16. Badan Kepegawaian Daerah

- a. Mekanisme recruitment CPNS baru juga menyerap anggaran APBD untuk pelaksanaannya harus di laksanakan secara professional serta menghilangkan biaya-biaya siluman yang di bebaskan kepada CPNS baru guna mendukung kredibilitas Pemerintah Daerah serta aplikasi pelaksanaan *Good Governance* dan *Clean Government*.
- b. Mutasi adalah merupakan pelaksanaan *Tour of Duty* guna mendukung Management Pemerintahan yang baik serta aplikasi pembinaan birokrasi tapi hendaknya tetap memperhatikan aspek kompetensi dan professional

di samping dedikasi dan loyalitas yang menjadi syarat utama, untuk itu analisis jabatan dan kepangkatan tetap harus di perhatikan.

17. Pemerintahan Desa

- a. Perlu adanya pembinaan-pembinaan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Desa terutama Kepala Desa yang baru sehingga penyelenggaraan Pemerintah Desa berjalan dengan baik, misalnya pembuatan PERDES tentang APBDes dan PERDES-PERDES yang lain.
- b. Terkait recruitment perangkat baru hendaknya pembiayaan di lakukan dengan prinsip-prinsip kewajaran, maka perlu di terbitkan Surat Edaran Bupati menyangkut batasan-batasan maksimal pembiayaan recruitment Perangkat Desa.
- c. Dengan adanya kekosongan SEKDES agar kiranya segera di isi sehingga pelayanan Desa bisa berjalan dengan baik.

18. Inspektorat

Perlu memaksimalkan peran Inspektorat terhadap pengawasan dan pembinaan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan di berbagai SKPD dan juga pengawasan kualitas proyek-proyek di Pemerintah Kabupaten Lamongan khususnya proyek jalan yang selama ini banyak mendapatkan sorotan dari masyarakat tentang rendahnya kualitas pelaksanaan pembangunan jalan.

19. Satuan Polisi pamong Praja

- a. Hendaknya menertibkan warung-warung di bantaran sungai.
- b. Mempertegas perijinan warung-warung yang terindikasi warung remang.

20. Kantor Perijinan

- a. Perijinan hendaknya memantau dan mengevaluasi pasca pengeluaran ijin;
- b. Sebelum mengeluarkan perijinan hendaknya berkoordinasi dengan instansi terkait untuk menghindari kesalahan di kemudian hari, misalnya AMDAL.

21. Bagian Hukum

- a. Lebih memaksimalkan sosialisasi terhadap produk-produk PERDA agar management Pemerintah berjalan sesuai dengan peraturan dan regulasi yang ada.

- b. Meminimalisasi permasalahan-permasalahan tingkat bawah agar tidak mencuat di tingkat Kabupaten dengan memaksimalkan peran Camat dan Kades.
- c. Memberikan supervise dan eksistensi terhadap produk-produk Peraturan Desa.
- d. Mengkaji dan mengevaluasi Perda-perda yang terdahulu untuk disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

22. Kecamatan

- a. Hendaknya para Camat dalam mengelola penyelenggaraan Pemerintahan lebih meningkatkan inovasi dan kreatifitas dalam management Pemerintahan mengingat statusnya sudah menjadi SKPD.
- b. Hendaknya di berikan pelatihan management terhadap petugas pemegang keuangan perencanaan pengelolaan serta pertanggung jawaban anggaran.
- c. Perlu meningkatkan turun ke desa-desa guna pembinaan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- d. Para Camat lebih meningkatkan koordinasi dengan Forum Muspika dan Pemangku Kepentingan yang yang lain agar terbina suasana yang kondusif.

23. Badan Pemberdayaan Masyarakat

Kinerja pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan desa pada Umumnya sudah mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Namun realisasi pelaksanaan pembangunan jembatan dan jalan poros desa kualitasnya kurang begitu baik, apalagi disertai kondisi tanah yang labil serta curah hujan yang cukup tinggi mempercepat rusaknya kondisi jembatan serta jalan poros desa secara menyeluruh, lebih-lebih dengan meningkatnya hasil prioduksi pertanian baik padi, tebu atau tanaman yang lain yang angkutannya melebihi tonase. Diharapkan SKPD terkait tidak henti-hentinya untuk memberikan penyuluhan/ pembinaan kepada masyarakat.

24. Dinas Pertanian

Pada musim tanam Tahun 2010 perubahan iklim dan cuaca sangat ekstrim dan sulit diprediksi sehingga seringkali terjadi serangan hama wereng

coklat yang melanda 18 Kecamatan di Kabupaten Lamongan. Belajar dari pengalaman ini, agar Pemerintah Daerah membuat kebijakan dan perhatian lebih besar kepada petani karena sektor pertanian merupakan penyumbang PDRB terbesar. Adapun bentuk kebijakan dan perhatian tersebut antara lain :

- a. Pengadaan Varietas Benih Unggul Tahan Wereng (VUTW) yang lebih adaptif dan Variatif, bukan benih Hibrida yang rawan terhadap hama wereng ;
- b. Menyiapkan program kebun benih yang berbasis desa agar petani bisa dilibatkan secara langsung, sekaligus bisa memilih dan mengembangkan benih VUTW yang adaptif di wilayahnya ;
- c. Penyediaan obat – obatan yang memadai dan secara cepat bisa didistribusikan kepada petani ;
- d. Penyediaan dana talangan tunda jual yang memadai untuk membeli hasil / produk gabah pada waktu panen raya (BOOMING) supaya harga gabah tidak jatuh, dan petani merugi.

25. Dinas Peternakan

- a. Program pembibitan sapi Tahun 2007 yang bersumber dari anggaran DAK perlu dilakukan kajian dan evaluasi mengingat program tersebut belum menunjukkan hasil yang memuaskan. Untuk itu, perlu ada manajemen pengelolaan yang baik sehingga tidak sampai terjadi kerugian.
- b. Kondisi Kandang dan cara pemeliharaan Sapi dinilai masih belum layak sehingga menyebabkan kondisi Sapi MAL NUTRISI. Pansus LKPJ meminta agar dilakukan pembenahan kandang dan perubahan cara pemeriharaan sapi yang baik sehingga menghasilkan keuntungan.

LAIN – LAIN :

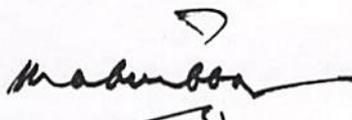
Selain catatan diatas, masih ada beberapa hal yang perlu memperoleh perhatian dan penyelesaian dari pemerintah daerah diantaranya :

1. Belum tercapainya target PAD yang berasal dari Pendapatan lain – lain yang Sah disebabkan karena Kesepakatan antara pemerintah daerah dengan Investor pembangunan Pasar Agrobis Babat mengenai pengembalian dana pembangunan Swakelola (Eks Stand Lama) sebesar Rp. 6 Milyar hingga kini belum tercukupi. Berkaitan dengan itu, Pansus minta agar dana tersebut tetap diupayakan secara optimal agar bisa dilunasi oleh pihak Investor;

2. Penyerapan dan penggunaan Dana Alokasi Khusus untuk pelaksanaan pembangunan hendaknya dimanfaatkan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku mengingat penggunaan anggaran DAK tahun 2010 pada SKPD tertentu masih belum sesuai harapan.
Selain itu, dalam rangka penyusunan anggaran hendaknya tepat waktu dan tepat program sehingga implementasinya sesuai ketentuan yang ada.
3. Terhadap manajemen LIS yang menurut Pansus masih belum ada transparansi perlu dilakukan pembahasan untuk membenahan meliputi :
 - a. Keberadaan Pejabat – pejabat Pemkab. Lamongan dalam manajemen LIS harus ada ;
 - b. Laporan Keuangan (pendapatan, biaya operasional, pendapatan bersih) harus jelas ;
 - c. Kontribusi harus didasarkan atas perhitungan riil / secara transparan
 - d. Pelaksanaan RUPS harus tepat waktu dan di muat dalam media.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN
PANITIA KHUSUS**

Ketua



H. MAKIN ABBAS, Lc, MA

Sekretaris



Ir. H. Ali Prasetyo